

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini memang merujuk pada pernyataan tertulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>1</sup> Dalam penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang, dengan terciptanya KUHP maka untuk pertama kalinya Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>2</sup>

Tujuan KUHP dapat di temui di dalam pedoman pelaksanaanya yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selangka-lengkapnyanya dari satu

---

<sup>1</sup>Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Badan Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 138.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1-2.

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidanakan (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>3</sup> Dalam pengungkapan tindak pidana peran aparat kepolisian amat penting, karena menjadi pihak pertama yang langsung berhubungan dengan korban dan pelaku tindak pidana. Setelah mendapatkan laporan atau dugaan terjadinya tindak pidana polisi melakukan penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Penyidik memiliki kewenangan yang sangat besar yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, mengingat kewenangannya yang sangat besar maka perlu diatur agar penyidik tidak menyalahgunakan kewenangannya. Untuk mengungkap sebuah tindak pidana penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, dalam perkara tindak pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54.

huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.<sup>4</sup> Secara implisit pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, membawa dampak yang luar biasa di kehidupan manusia. Banyak para pakar teknologi menyebutnya dengan *revolusi digital*, yaitu: perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.<sup>5</sup> Dalam perjalanannya penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi, kamera pengintai, CCTV, CCTV Camera, Spy came, video recorder, dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup>Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. Hal. 99.

<sup>5</sup>Sandiego, *Revolusi Digital*, dalam <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diunduh sabtu, 20 oktober 2012, pukul 15:00.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem common law. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang yang bernafaskan pidana (*tindak pidana khusus*) sudah diatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP. Dalam pasal 184 KUHAP yang menjadi undang-undang payung bagi hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni: *saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa*. Perumusan ini sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang ada. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan Umum.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **"Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana"**

---

<sup>6</sup>Lelyemin, Marselus Pasha; Nugroho, F. Hartadi Edy, 2007, *Kedudukan Rekaman Video sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma jaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Teknologi Alat Perekam Video dalam membantu Kepolisian mengungkap Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana ?
3. Bagaimanakah Putusan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pembuktiannya diperkuat dengan Rekaman Video ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Teknologi Alat Perekam Video yang dilakukan kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana.
3. Untuk mendeskripsikan Putusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pembuktiannya diperkuat dengan Rekaman Video.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya bagi hukum acara pidana dalam prakteknya.

##### 2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang pembuktiannya di perkuat dengan rekaman video.

#### E. Kerangka Pemikiran.

Tugas Kepolisian didalam penegakan hukum memiliki peran sentral, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, yang berbunyi sebagai berikut:

*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum**, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Penebalan di atas dilakukan, dengan tujuan sebagai penekanan bahwa Polri bukan sebagai abdi peraturan, tetapi Polri adalah lembaga yang apabila dengan dikaitkan dengan hukum adalah sebagai penegak hukum atau sebagai abdi hukum, artinya harus mampu menemukan keseimbangan antara

keselarasan fakta yang berubah dilapangan.<sup>7</sup> Dalam pengungkapan tindak pidana Penyidik dalam penyidikan akan mencari informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal), informasi itu bukan saja hanya terbatas pada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Di sinilah dibutuhkan sumberdaya manusia dari seorang penyidik, selain itu teknologi juga akan sangat berperan.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah penerapan teknologi perekam video dalam pengungkapan tindak pidana. Kamera perekam (*bahasa Inggris: Camera Recorder, disingkat Camcorder*) adalah sebuah alat elektronik yang menggabungkan kamera video dan perekam video ke dalam satu unit. Tampaknya tidak ada aturan khusus yang mengatur nama dari alat ini. Dari segi pemasaran alat ini diberi nama *camcorder* atau *camera recorder* (kamera perekam), namun jika dilihat dari konten serta fungsinya alat ini lebih dikenal dengan kamera perekam video. Dalam rangka untuk membedakan kamera perekam dengan alat lain yang memiliki fungsi sebagai perekam video, seperti ponsel dan kamera digital, kamera perekam umumnya diidentifikasi sebagai perangkat portabel, dengan aplikasi pengambil dan perekam video sebagai fungsi utamanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 40.

<sup>8</sup>*Perekam suara dan video*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/perekam\\_suara\\_video](http://id.wikipedia.org/wiki/perekam_suara_video) diunduh sabtu, 20 oktober 2012, pukul 15:00.

Penerapan teknologi ini merupakan kemajuan dari penegakan hukum dan salah satu wujud *Asas Presumption of Innocent* yang diartikan sebagai *Asas Praduga Tidak Bersalah* artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan adanya rekaman video tersebut, akan membuat penyidik lebih yakin bahwa seseorang tersebut bersalah dan sebagai bukti permulaan yang cukup, sehingga meminimalisir penyelewengan *Asas Presumption of Innocent*. Dalam penegakan hukum di Indonesia dikenal mengenai alat bukti yang diatur didalam beberapa undang-undang yang bernafaskan pidana khusus (*lex specialis derogat legi generali*), misalnya *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* . Undang-undang khusus tersebut sudah mengatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang diterima oleh Pengadilan dalam pembuktian bersifat limitatif terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. *Keterangan saksi*,
- b. *Keterangan ahli*,
- c. *Surat*,
- d. *Petunjuk*,
- e. *Keterangan terdakwa*

Selain, di luar kategori yang telah ditetapkan undang-undang tersebut, alat bukti apapun tidak sah. Maka dari itu, dengan diakomodasinya



penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam Undang-Undang yang bersifat khusus atau *lex specialis derogat legi generali*. Merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di Indonesia. Sayangnya, ketentuan tersebut khusus (*Lex Specialist*) diperuntukkan bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga alat bukti rekaman, video, sms, email, dan lain-lain tidak bisa digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum.<sup>9</sup> Melihat dari realitanya, maka hasil rekaman video tindak kejahatan. Tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam peradilan umum, karena didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP telah diatur alat bukti secara secara limitatif, sehingga hasil rekaman video hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk melengkapi alat bukti lain yang tidak dapat berdiri sendiri, yang dipakai hakim sebagai alat bukti petunjuk.

Terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sudah tentu untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pelaku tersebut mengakuinya bahwa suara dan orang didalam gambar yang diperdengarkan di muka sidang

---

<sup>9</sup>*Video Jadi Alat Bukti Pengadilan*, [http://menitik\\_kembali.wordpress.com/2010/10/13/facebook-jadi-alat-bukti-di-pengadilan/html](http://menitik_kembali.wordpress.com/2010/10/13/facebook-jadi-alat-bukti-di-pengadilan/html) diunduh Sabtu 20 Oktober 2012 pukul 15:00.

pengadilan adalah suara dirinya.<sup>10</sup> Setelah hakim memiliki keyakinan, maka hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

## **F. Metode Penelitian.**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu: penelitian di mana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>12</sup> Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang Penerapan teknologi perekam video sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana.

### **2. Metode Pendekatan**

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan

---

<sup>10</sup>Alat Bukti Rekaman dalam <http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2434-rekaman-perkara-korupsi>.diunduh Kamis 18 Oktober 2012 pukul 16:15.

<sup>11</sup>Kudzhafah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3.

<sup>12</sup>P. Joko Subagyo. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 91.

ilmu pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam perbuatan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk didalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut “bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat)” dan dari sudut “bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya”. Sudut pandang pertama mempelajari (melihat) dari sudut *normatif* atau dari sudut pandang dunia ide/harapan/cita-cita (*das sollen*). Ilmu hukum pidana yang memandang atau meninjaunya dari sudut ini sering dikatakan sebagai “*ilmu hukum pidana normatif*”. Sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana hukum pidana senyatanya) mempelajari dari sudut factual atau dunia nyata (*das sein*).<sup>13</sup> Jadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah membandingkan Putusan Perkara Pidana yang dibandingkan dengan norma hukum (undang-undang) yang ada, sedangkan

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 3-4.

wawancara merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data.<sup>15</sup> Penelitian normatif atau doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian tipe ini lazim disebut *studik dogmatik* atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder, yaitu menggunakan data berupa Putusan Perkara Pidana yaitu, Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg.<sup>17</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini studi kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca atau mempelajari Putusan Perkara Pidana. Serta metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>18</sup> Dengan mengadakan studi atau penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publisng, hal. 62.

<sup>15</sup>Arifin, E. Zaenal. 1998. *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: PT Gramedia widia sarana indonesia. hal.54.

<sup>16</sup>Wignjosoebroto, Soetandyo (ed.). 1974. *Penelitian hukum sebuah tipologi: Majalah masyarakat indonesia*. hal. 2.

<sup>17</sup>Mahkamah Agung, dalam <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c9170b85e831d5e429d0dcf938adb57c/pdf>, diunduh Rabu, 03 januari 2013, pukul 09.45.

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma. 1991. *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*. Bandung: Mandar Maji. hal. 81.

penelitian di lapangan, data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan.<sup>19</sup> Sedangkan wawancara merupakan sumber data pelengkap dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini karena sulitnya memperoleh data, penulis mengambil data dari Web Site Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif. Pemecahan masalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>20</sup> Analisis dilakukan secara kualitatif sebab penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif terhadap data sekunder. Secara konkrit cara penulis melakukan analisis data dengan cara: *Pertama*, mencari sumber data sekunder yaitu berupa Putusan Perkara Pidana. *Kedua*, kemudian penulis mencari bahan untuk menjadi dasar analisis, yaitu berupa norma hukum positif (Undang-Undang), yurisprudensi dan doktrin. *Ketiga*, penulis meneliti, mengevaluasi, dan membandingkan Putusan Perkara Pidana (premis minor) dengan norma hukum positif atau Undang-Undang (premis mayor), dan *keempat*, penulis akan menarik kesimpulan atau

---

<sup>19</sup>Makmur, Subekti dan Hermin. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Unggaran:badan penyedia diklat kualitatif FH UNDARIS. hal. 14.

<sup>20</sup>Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 236.

konklusi apakah Putusan Perkara Pidana sudah sesuai dengan norma hukum yang atau tidak.

#### **G. Sistematika Skripsi.**

Untuk memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini Penulis disini akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai penerapan teknologi perekam video,yaitu mengenai:

1. Tinjauan umum mengenai alat perekam video.
  - a. Sejarah kamera perekam video.
  - b. Penerapan alat perekam video.
  - c. kedudukan Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana umum.
2. Tinjauan umum mengenai alat bukti.
  - a. Alat bukti yang diatur di dalam KUHAP.
  - b. Alat bukti yang diatur di dalam RUU KUHAP
  - c. Alat bukti yang diatur khusus di luar KUHAP.
3. Tinjauan umum mengenai pembuktian
  - a. Karakter hukum pembuktian.
  - b. Sistem pembuktian.

- c. Parameter pembuktian.
  - d. Asas-asas pembuktian.
4. Tinjauan umum mengenai penyelesaian perkara pidana.
- a. Penyelidikan.
  - b. Penyidikan.
  - c. Penuntutan.
  - d. Putusan hakim.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang hasil penelitian dan analisa secara rinci mengenai penerapan teknologi perekam video yang dilakukan kepolisian, alat bukti, pembuktian dalam sistem pidana umum, dan putusan hakim dengan norma hukum positif (Undang-Undang)

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini. sehingga, lengkaplah susunan atau sistematika dalam penulisan skripsi ini.